



# Buletin Parlementaria

Nomor 979/IX/2017 • Oktober 2017



**Perangko Rekam  
Berbagai Peristiwa Sejarah  
Bangsa Indonesia**

**Penyadapan KPK Tak Boleh  
Langgar HAM**

# Paripurna DPR Setujui Laporan Kerja Pansus Angket KPK

**TIDAK  
DIPERJUAL  
BELIKAN**

# Paripurna DPR Setujui Laporan Kerja Pansus Angket KPK



Pimpinan DPR berfoto bersama Ketua Pansus KPK Agun Gunandjar (kiri) dan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo (kanan)

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Selasa (26/9) menyetujui Laporan Kinerja Pansus Angket KPK sebagaimana dilaporkan Ketuanya Agun Gunandjar Sudarsa. Namun persetujuan itu diwarnai penolakan empat fraksi untuk tidak memperpanjang kerja pansus terdiri Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra.

**F**ahri Hamzah yang didampingi Wakil Ketua Agus Hermanto dan Fadli Zon hanya menawarkan apakah laporan Ketua Pansus Angket disetujui atau tidak? Kemudian dijawab serentak peserta Rapat Paripurna minus empat fraksi dengan koor “setuju” lalu ketukan palu menandai sahnyanya keputusan tersebut.

Rapat Paripurna diawali dengan pemaparan hasil temuan Pansus Angket KPK. Saat menyampaikan pemaparan, Pansus tidak bisa mengeluarkan rekomendasi lantaran masih perlu kehadiran KPK.

“Pansus belum dapat membuat sebuah kesimpulan dan rekomendasi

pada subjek penyelidikannya. Tidak fair dan tidak adil dalam sidang paripurna ini, kami ambil keputusan sepihak atas temuan tersebut karena temuan tersebut harus dikonfirmasi, karena itu Pansus akan terus kerja,” ujar Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar.

Meski menghargai hasil kerja Pansus, keempat fraksi tersebut dalam interupsinya menyatakan menolak untuk memperpanjang kerja Pansus. Fraksi PAN lewat jubitnya Yandri Susanto mengharapkan kerja Pansus cukup sampai disini saja. Adapun hasil kerja yang dilaporkan Ketua Pansus dinilai sudah cukup memadai, kalau mau buat rekomendasi bisa disusun dalam

beberapa hari ke depan.

Matri Agung dan Ecky Awal Muharam dari Fraksi PKS dan Erma Suryani Ranik dari Fraksi Demokrat sejak awal menolak keberadaan Pansus Angket KPK dan tidak mengutus anggotanya, secara tegas menyatakan tidak bertanggungjawab atas hasil kerja Pansus. Mereka juga menolak masa perpanjangan kerja Pansus dan akhirnya melakukan walk out.

Meski diwarnai penolakan dan aksi walk out, tetapi masa kerja Pansus bisa dilanjutkan, sebagaimana ditegaskan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, secara tidak langsung, masa kerja Pansus Angket KPK diperpanjang. ■

(imp).Foto:Eno/hr



# Paripurna DPR Tetapkan Lima Calon Hakim Agung

DPR RI menetapkan lima nama calon anggota Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial (KY) dalam Rapat Paripurna DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Senayan, Jakarta, Selasa (26/9).

Laporan dibacakan langsung Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, dalam surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI tertanggal 08 Februari 2017, disebutkan bahwa terdapat kekosongan jabatan 6 (enam) jabatan Hakim Agung di Mahkamah Agung RI dan terdapat 2 (dua) Hakim Agung di Mahkamah Agung yang akan memasuki masa pensiun. Untuk itu, Komisi Yudisial mengajukan sebanyak lima nama calon Hakim Agung.

Diungkapkan Bambang Soesatyo, Kelima nama tersebut telah lolos setelah menjalani serangkaian tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan di Komisi III DPR RI. Mereka adalah Gazalba Saleh untuk mengisi Kamar Peradilan Pidana, Muhammad Yunus Wahab untuk mengisi kamar Peradilan Perdata, Yasardin untuk mengisi Kamar Peradilan Agama, Yodi Martono Wahyunadi untuk mengisi Kamar Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hidayat Manao untuk mengisi Kamar Peradilan Militer.

"Proses uji kelayakan terhadap calon hakim agung merupakan rangkaian yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, DPR juga turut melakukan uji kelayakan sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas



Pimpinan DPR berfoto bersama lima calon Anggota Hakim Agung

dan transparansi antara lembaga," ungkap politisi Golkar ini.

Diharapkan calon Hakim Agung terpilih dapat menjadi Hakim Agung yang mampu meningkatkan citra dan wibawa Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertentu.

Di akhir sambutannya, Bambang Soesatyo menitipkan pesan kepada calon hakim agung untuk senantiasa menjaga keadilan bagi masyarakat. "Kami titipkan palu Tuhan kepada yang mulia untuk berpihak kepada hukum dan kebenaran. Sebagai benteng terakhir, di pundak yang mulia rasa keadilan masyarakat dipertaruhkan. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan sekali lagi kami ingatkan kepada yang mulia tegakkan hukum walau langit runtuh," seru Bambang Soesatyo. ■

(ann/isc), Foto: Jayaditih

**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI  
**PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**  
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)  
**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

**WK. PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),  
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),  
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

**REDAKTUR**  
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Hasri Mentari, Guntur Dewanto

**ANGGOTA REDAKSI**  
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,  
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra  
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega

**REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra, Iwan Armanias

**FOTOGRAFER**  
Rizka Arinindy, Supardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief  
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

**ADMINISTRASI FOTO**  
Bagus Mudjiharjanto

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**  
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,  
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



## PENERBITAN

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E, Barliansyah,  
Fathurrahman, Abdul Kahfi, S. Kom

**DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)

**ADMINISTRASI**  
Sjaefudin, S.Sos

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Mujiono

**PHOTOGRAFER ART**  
Friederick Munchen

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Arif, Lamin, Remon,  
Yuliana Puspita, Ifan, Izzi Fauzul Umam

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN  
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN



Tim Biro Pemberitaan Parlemen dipimpin Drs. Jaka Dwi Winarko, M.Si, beserta Kabag Metaksos dan Staf Pendistribusian Bagian Penerbitan melakukan evaluasi dan peninjauan distribusi Majalah dan Buletin Parlemenaria ke Sumbawa, Provinsi NTB, (27/9). Tempat yang dikunjungi diantaranya adalah Perpustakaan Daerah dan Polres Sumbawa (TIM PENERBITAN)

# Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Informasi Pusat



Pimpinan DPR berfoto bersama tujuh calon Anggota Komisi Informasi Pusat terpilih

DPR RI mengesahkan tujuh nama calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam Rapat Paripurna yang digelar pada hari Selasa (26/09/2017). Seluruh anggota Dewan yang hadir menyepakati hasil uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah dilakukan oleh Komisi I DPR.

Pengesahan dimulai dari pembacaan laporan hasil *fit and proper test* yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viafa Hafid. Meutya menyatakan bahwa Komisi I sudah menjalankan amanat yang disampaikan pemerintah. Selain itu ia juga menyampaikan soal rangkaian acara *fit and proper test* calon anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dilakukan oleh Komisi I DPR, hingga akhirnya terpilih 7 Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk periode 2017-2021 dari 21 calon komisioner yang ikut dalam *fit and proper test*.

"Proses uji kepatutan dan kelayakan berlangsung secara terbuka selama dua hari, dimulai tanggal 13 September 2017 dan berakhir pada 14 September 2017. Setelah uji kepatutan dan kelayakan selesai dilaksanakan, Komisi I DPR melanjutkan rapat intern Komisi I dalam rangka memilih tujuh orang

calon anggota Komisi Informasi Pusat periode 2017-2021 yang mencerminkan unsur pemerintah dan masyarakat," ucap Meutya dihadapan peserta Sidang

Paripurna DPR.

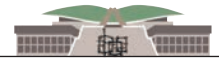
Adapun tujuh komisioner KIP yang terpilih tersebut adalah Hendra Alias Hendra J Kede (unsur masyarakat), Arif Adi Kuswardono (unsur masyarakat), Cecep Suryadi (unsur masyarakat), Gede Narayana (unsur masyarakat), Wafa Patria Umma (unsur masyarakat), Romanus Ndaou (unsur masyarakat), dan Tulus Subardjono (unsur pemerintah). ■

(dep.mp), Foto: Jayadi/hr



Wakil Ketua DPR Korpolkam, Fadli Zon menerima delegasi masyarakat korban penyerobotan tanah

Demikian mengemukakan dalam perbincangan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menerima delegasi masyarakat korban penyerobotan tanah di Kebayoran Lama, Jakarta, di ruang kerjanya, Senin (25/9/2017). Tanah masyarakat, bahkan yang sudah memiliki sertifikat hak milik, kerap dikorbankan untuk pembangunan infrastruktur jalan



**P**residen Rodrigo Roa Duterte berkesempatan menjadi Keynote Speaker pada penutupan Sidang Umum tahun ini. Presiden Duterte menekankan bahwa pencapaian Visi Komunitas ASEAN 2025 membutuhkan keterlibatan semua pihak terutama dalam menerjemahkan Cetak Biru Komunitas ASEAN menjadi pertumbuhan inklusif yang memberikan kesejahteraan dan menjembatani perbedaan ekonomi antara negara-negara di Asia Tenggara. Sebagai kawasan yang dinamis ASEAN menghadapi berbagai tantangan, baik tradisional maupun non-tradisional. “Dalam konteks ini, AIPA seharusnya dapat memegang peran yang lebih signifikan bagi pencapaian Komunitas ASEAN. AIPA memiliki aset berharga yaitu 40 tahun kerjasama untuk meningkatkan solidaritas antar parlemen yang berkontribusi bagi terwujudnya ASEAN yang berorientasi pada rakyat,” demikian ditegaskan Presiden Duterte.

Penandatanganan Joint Communiqué yang memuat intisari persidangan secara komprehensif juga menandai penutupan Sidang Umum AIPA. Joint Communiqué memuat juga posisi DPR RI atas krisis kemanusiaan yang melanda Myanmar sebagaimana disampaikan Ketua Delegasi, Dr. Fadli Zon, pada Sidang Pleno Pertama AIPA. DPR RI mendorong percepatan penyelesaian damai, rekonsiliasi dan pemulihan stabilitas di Rakhine State, serta penanganan pengungsi Rohingya berdasarkan kemanusiaan dan hukum humanitarian internasional yang berlaku tanpa memandang etnis, ras, agama dan

## Sidang Umum ke-38 AIPA Adopsi Usulan-Usulan Indonesia

Sidang Umum AIPA ke 38 resmi ditutup oleh Presiden ke-38 AIPA sekaligus Ketua Parlemen Filipina, Pantaleon D. Alvarez di Manila, Filipina. Sidang menghasilkan berbagai keputusan termasuk adopsi resolusi-resolusi usulan Indonesia mengenai penanganan sampah plastik di lautan, penguatan kapasitas AIPA serta pertumbuhan ekonomi inklusif dan inovatif dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

kewarganegaraan.

Agenda tahunan AIPA juga memberikan kesempatan bagi negara-negara anggota untuk melakukan dialog dengan negara peninjau. Topik yang dibahas dalam dialog tersebut antara lain peningkatan kerjasama penanganan kejahatan transnasional terutama terorisme dan ekstrimisme, perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup, serta manajemen penanggulangan bencana.

Dalam dialog dengan Parlemen Eropa, anggota delegasi Indonesia Sartono Hutomo menyampaikan komitmen Indonesia bagi pembenahan sektor kelapa sawit dari hulu hingga ke hilir. Pembenahan menyentuh berbagai aspek termasuk aspek legislasi

melalui RUU Perkelapasawitan tengah dibahas di DPR RI. Komitmen Indonesia ditunjukkan pula dengan standar nasional pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan yang mencakup aspek legalitas, tanggung jawab lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. ■



Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Delegasi Fadli Zon bersama Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf saat Sidang Pleno Pertama AIPA di Philipina

(BKSAP), Foto: dok-bksap/hr.

## Hak Masyarakat Atas Tanah Harus Dihormati

Kasus penyerobotan tanah masyarakat oleh korporasi seperti tak pernah habisnya. Ketika penegakan hukum lemah, para mafia tanah pun bermain. Tak jarang penegak hukum pun ikut bermain dalam sengketa tanah.

tanpa ganti rugi yang memadai.

“Kalau kita melihat banyak kasus pertanahan dari sejak tahun 1965, hak-hak masyarakat atas tanah, bahkan yang memiliki sertifikat, diserobot oleh korporasi atau kepentingan usaha besar. Masyarakat seringkali dikorbankan. Nanti kami akan pelajari lebih jauh, apa yang bisa dilakukan dalam kasus ini,” ucap Fadli

usai pertemuan.

Fadli juga segera meyerahkan masalah penyerobotan tanah di Kabupaten Lama untuk membuka jalan tol ini ke Komisi II DPR yang kebetulan bermitra dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebetulnya, pengadilan juga sudah menetapkan agar masyarakat pemilik tanah ini diberikan ganti rugi. Tapi,

hingga kini belum diterima, sementara hak atas tanahnya sudah diambil alih.

“Saya kira mafia tanah faktanya memang ada. Korporasi besar yang paling banyak membutuhkan tanah harus tetap proper pada masyarakat. Tidak bisa tanah masyarakat main ambil, tapi tidak diberikan kompensasi dan anti ganti rugi yang sepadan. Saya kira ini yang menimbulkan konflik di masyarakat dan tidak pernah tuntas,” ujar Fadli.

Konflik tanah, sambung Fadli, selalu muncul akibat penegakan hukum yang lemah dan banyak mafia tanah yang bermain mencari keuntungan. Bahkan, para pengacara yang sudah disewa untuk membela masyarakat malah ikut bekerja sama dengan pihak yang merampas hak tanah masyarakat. ■

(mhr,mp), Foto: Jayadi/hr

# Perangko Rekam Berbagai Peristiwa Sejarah Bangsa Indonesia

Prangko merupakan salah satu benda yang merekam berbagai peristiwa sejarah di bangsa ini. Bahkan sejak prangko diterbitkan tahun 1864 sudah banyak yang disampaikan tentang kebhinnekaan, mulai dari pakaian adat, rumah adat, berbagai macam keindahan alam, budaya dan lain sebagainya yang terekam dalam prangko.

Ungkap Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat membuka Pameran Filateli sebagai salah satu rangkaian HUT DPR ke-72 serta memperingati Hari Bakti Pos. Masih kata Fadli, melalui pameran ini, DPR ingin memberitahu bagaimana kebhinnekaan terekam dalam prangko.

“Prangko bukan hanya benda filateli untuk surat menyurat tetapi merupakan arsip yang telah merekam perjalanan sejarah, identitas bangsa dan alat yang mempromosikan keanekaragaman kita,” jelas Fadli yang juga merupakan Kolektor Filateli di Lobi Gedung Nusantara, Senin (26/9/2017).

Tema tentang ‘Prangko dalam Kebhinekaan’ diambil, pasalnya menurut politisi partai Gerindra ini, masalah kebhinnekaan merupakan permasalahan khusus yang selalu dibicarakan. Terlebih Indonesia merupakan negara yang menganut Kebhinnekaan dilihat dari sisi beragam agama, budaya, adat-istiadat, etnis dan sebagainya.

“Kebhinnekan harus menjadi kekuatan dan potensi untuk menjadi negara yang besar. Saya melihat kebhinnekaan merupakan kekuatan yang saling mengisi, saling bekerjasama untuk mewujudkan cita-cita proklamasi,” katanya.

Lebih lanjut Fadli mengatakan, prangko juga bisa dijadikan investasi karena memiliki kelangkaan yang tinggi dan masih banyak peminatnya sampai saat ini. “Prangko dan filateli masih tetap hidup di hampir semua negara, bahkan baru-baru ini PT. POS Indonesia menyelenggarakan pameran filateli dunia yang dihadiri 62 negara,” tuturnya.

Hadir dalam pembukaan pameran siswa SD Al-Izhar Pondok Labu yang tergabung dalam club filateli. Dihadapan para siswa Fadli berharap para siswa bisa menjadi regenerasi kolektor prangko yang merupakan benda yang merekam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

“Mudah-mudahan kegiatan ini ikut memberikan inspirasi bagi generasi muda, agar bisa ikut melestarikan prangko yang memiliki nilai berharga karena menandari peristiwa, waktu dan sejarah perjalanan bangsa,” pungkasnya. ■

(rmm). Foto : jayadilfir.





150  
REPUBLIC OF INDONESIA  
**FILATELI**

# Prangko dalam Kebhinnekaan

26-29 September 2017

DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat 10270

@DPRRI | dpr.ri



Wakil Ketua DPR Fadli Zon usai membuka Pameran Filateli

## Kerja Sama Indonesia dan Kroasia Berpotensi Meningkatkan



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan bersama Wakil Ketua Parlemen Kroasia, eljko Reiner

Tren perdagangan antara Indonesia dan Kroasia selama 5 tahun terakhir, pada 2012-2016) mengalami kenaikan sebesar 21,10 persen. Pada tahun 2016, angka perdagangan mengalami peningkatan dari tahun 2015, yaitu dari USD 46,01 juta menjadi USD 62,89 juta. Hubungan kerja sama Indonesia dan Kroasia berpotensi untuk meningkat lagi.

**W**akil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, saat ini Indonesia mengeksport mineral fuels, minyak, organic chemicals, produk perikanan, kertas, paperboard, produk sabun, kopi, teh, tekstil dan produk kulit serta elektronik kepada Kroasia. Sementara Kroasia mengeksport produk kimia,

produk farmasi, bahan pupuk, peralatan elektronik, railway dan perkeretaapian, tembakau, kayu serta mesin-mesin kepada Indonesia.

Demikian dikatakan Taufik saat memimpin kunjungan kerja ke Parlemen Kroasia di Zagreb, Kroasia, Selasa (26/9/2017), dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia

dengan Kroasia. Kunjungan yang diikuti beberapa Anggota DPR RI lintas komisi dan fraksi ini diterima langsung oleh Wakil Ketua Parlemen Kroasia, eljko Reiner beserta dan beberapa Anggota Parlemen Kroasia lainnya. Turut mendampingi Delegasi DPR RI, Duta Besar Indonesia untuk Kroasia, Sjachroedin Zainal Pagaralam.

“Hubungan perdagangan kedua negara berpotensi sangat besar untuk meningkat lagi, dengan kerjasama saluran distribusi produk dalam negeri. Dimana Indonesia menjadi pintu gerbang pasar produk Kroasia ke ASEAN, dan Kroasia menjadi pintu gerbang pasar produk Indonesia ke Eropa,” kata Taufik.

Apalagi, tambah Taufik, saat ini Indonesia tengah gencar untuk memperbanyak infrastruktur pelabuhan dan membangun tol laut. Sementara, Kroasia memiliki banyak kota pelabuhan dan industri perkapalan yang mumpuni, dan kondisi geografis yang langsung bertemu dengan Laut Adriatic.

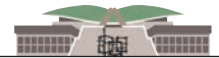
“Kedua potensi infrastruktur ini akan sangat mempermudah pasar produk baik Indonesia maupun Kroasia,” imbuh politisi F-PAN itu.

Taufik memaparkan, kedua negara juga tengah menjajaki kerjasama industri kreatif. Indonesia berkomitmen untuk menciptakan 1000 startup digital, dengan jangkauan 93 juta netizen berkewarganegaraan Indonesia. Bahkan, total penjualan e-commerce Indonesia sebesar US\$ 2,6 miliar pada 2014. Sementara di bidang perfilman, sineas Indonesia dan sineas Kroasia juga saling membagi wawasan perfilman sekaligus untuk saling mengenalkan budaya kedua negara melalui karya film anak bangsa.

Peringatan 25 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kroasia pada 2 September lalu, menurut Taufik juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Kroasia melalui pertemuan-pertemuan bilateral, dan melalui Diplomasi Parlemen.

Taufik memastikan, kerja sama Saling Dukung antara Indonesia dan Kroasia juga semakin erat, ditandai dengan dukungan Kroasia terhadap Indonesia untuk menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan





PBB 2019-2020, dan beberapa Organisasi Internasional lainnya.

“Selain itu, tahun lalu juga sudah dibentuk Indonesian-Croatian Friendship Group (GKSB), saya harap dengan dibentuknya Friendship Group ini dapat meningkatkan kerjasama antar parlemen kedua negara,” harap politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Mengakhiri pertemuan, Taufik menyambut baik apabila ada kunjungan balasan dari Parlemen Kroasia ke Indonesia, mengingat hubungan antar parlemen kedua negara perlu dijaga dan diperkuat. Ia pun berharap kerja sama bilateral Indonesia-Kroasia semakin meningkat, dan memberikan angin segar bagi kerjasama pendidikan, perdagangan,

infrastruktur dan industri kreatif kedua negara.

“Pertemuan ini kami harap dapat memperkuat kerjasama bilateral Indonesia-Kroasia, mengingat DPR RI memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia melalui fungsi Diplomasi Parlemen,” tutup Taufik. ■

(sf,mp), Foto: sofiyan/hr

## GKSB DPR Berbagi Pengalaman Kehidupan Demokrasi dengan Slovakia

Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Slovakia melakukan kunjungan kerja ke Bratislava, Slovakia, baru-baru ini. Hubungan kerjasama antara kedua negara, dan kondisi politik, ekonomi, sosial dan lainnya, menjadi bahasan dalam pertemuan antara Delegasi GKSB DPR RI dengan Parlemen Slovakia.

**D**elegasi diterima oleh Wakil Ketua Parlemen Slovakia Andrej Hrnčiar dan Ketua *Parliamentary Friendship Group with the Republic of Philippines, the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of Singapore and the Kingdom of Thailand*, Richard Vasecka.

Ketua Delegasi GKSB DPR RI - Slovakia Sri Meliyana menyampaikan bahwa kunjungan GKSB kali ini adalah kunjungan untuk yang kedua kalinya. Kunjungan sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2011, dan telah terjalin kerjasama yang baik antara kedua negara khususnya di bidang pertanian dengan Universitas Nitra, Slovakia.

Diskusi berlangsung hangat saat diskusi terhadap perkembangan terkini di kedua negara. Dialog tentang sistem parlemen dan bagaimana peran parlemen dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan berbangsa dan bernegara berjalan lancar dan informatif. Delegasi GKSB Indonesia memberikan beberapa informasi yang sangat dibutuhkan oleh Slovakia.

“Mayoritas umat Islam di Indonesia melindungi minoritas. Toleransi antar umat beragama di Indonesia pun berjalan dengan sangat baik sehingga menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia,” jelas Meli, panggilan akrab Sri Meliyana.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan bahwa Demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun toleransi beragama di Indonesia sangat baik.

“Pemeluk Islam yang mayoritas

melindungi kelompok minoritas karena Islam adalah agama yang cinta damai,” imbuh Meli.

Selain hal tersebut, Delegasi GKSB dengan Parlemen Slovakia juga membahas mengenai potensi di bidang pariwisata, pertanian, kerjasama perindustrian dan perdagangan, penanganan korupsi dan beberapa isu terkini kedua negara.

Menutup pertemuan, GKSB DPR RI mengundang anggota *Parliamentary Friendship Group Parliament Slovakia* untuk berkunjung ke Indonesia pada tahun 2018. Delegasi GKSB pun berkesempatan untuk ikut menghadiri pembukaan Sidang Parlemen Slovakia.

Setelah melakukan pertemuan dengan Parlemen, Delegasi GKSB DPR RI melanjutkan kunjungan ke GLOBSEC, sebuah Lembaga Penyelenggara *Global Security*. Saat sesi diskusi, Meli menyampaikan kondisi demokrasi di Indonesia. Meskipun terdiri dari berbagai suku dan agama namun tetap aman dan saling menghargai perbedaan.

Politisi asal dapil Sumatera Selatan itu berharap Globsec sebagai lembaga independen dapat memberikan opini yang adil atas kondisi Indonesia di mancanegara. Dari pertemuan itu, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan bekerjasama terkait isu-isu pengungsi, terorisme, pertahanan dan keamanan di

kawasan.

“Harapan kami, suatu hari ada langkah yang lebih nyata antara Indonesia dengan Globsec. Kami akan menyampaikan kepada pemerintah bahwa kami telah bertemu dengan Globsec yang bisa menjembatani antara Indonesia dengan Uni Eropa,” imbuh Meli.

Acara dilanjutkan dengan kunjungan ke Slovak Indonesian Chamber of Commerce (SIOK) atau Kamar Dagang dan Industri Slovakia-Indonesia. Dalam pertemuan ini, SIOK mengundang sejumlah pengusaha Slovakia yang dipandang memiliki potensi ataupun telah bekerja sama dengan Indonesia.

Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa kedua pihak sepakat untuk mendorong kerja sama di berbagai sektor industri. Delegasi GKSB DPR RI berharap para pengusaha Slovakia dapat berinvestasi di Indonesia.

Kunjungan ini juga diikuti sejumlah anggota DPR RI dari lintas fraksi dan lintas komisi di DPR RI, diantaranya Dwita Ria Gunadi, Amin Santono, Rooslynda Marpaung, Ammy Amalia Fatma Surya, Irmawan, Fatmawati Rusdi, Sulaiman L. Hamzah, Wardatul Asriah, dan Daryanto. ■

(sf), Foto: dok.BKSA/HR



Delegasi GKSB DPR RI kunjungi Parlemen Slovakia

# Penyadapan KPK Tak Boleh Langgar HAM

Dalam kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI dengan KPK, kewenangan penyadapan KPK menjadi poin penting yang digaris bawahi. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman menekankan agar kewenangan penyadapan KPK yang diatur dalam SOP tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hak Asasi Manusia (HAM).



Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman

**K**arena menurut Benny, penyadapan berkaitan erat dengan hak asasi manusia dan penghormatan harkat dan martabat pribadi disetiap manusia.

Komisi III DPR RI juga mendesak Pimpinan KPK agar dalam melaksanakan kewenangan penindakan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Namun Benny menyampaikan dukungannya pada kewenangan

penyadapan yang dimiliki KPK, karena itu adalah senjata pamungkas bagi KPK untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.

“Meskipun demikian kita meminta KPK untuk menggunakan kewenangan tersebut secara transparan, secara akuntabel dan juga secara profesional, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dan disamping itu tentunya untuk menghormati Hak Asasi Manusia

(HAM),” ungkap Benny di ruang sidang Komisi III, Selasa (26/9/2017) malam.

Dia menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dan asas penegakan hukum yang diatur dalam UU KPK harus ditaati, seperti asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas proporsionalitas, dan juga asas penegakan hukum.

Benny menjelaskan, Komisi III juga meminta KPK memperhatikan lima asas yang telah menjadi landasan institusi itu seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas untuk menggunakan kewenangan yang luar biasa yaitu penyadapan dan OTT.

Komisi III juga meminta KPK melaksanakan kewenangan koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi dengan melakukan kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Benny menilai tidak mungkin pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa berhasil diatasi tanpa melibatkan institusi Kepolisian dan Kejaksaan.

Selain itu Komisi III juga meminta KPK jangan terlalu lama menetapkan seseorang menjadi tersangka, sehingga harus cepat demi kepastian hukum, menghargai hak asasi dan juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi.

Benny menegaskan jangan sampai ada seorang tersangka ditetapkan lebih dari satu tahun sehingga pihaknya meminta supaya sesegera mungkin seseorang yang ditetapkan tersangka langsung, dan tidak lama kasusnya dilimpahkan ke pengadilan. ■

(eko), Foto : Andri/hc

## Indonesia Perlu Ratifikasi Perjanjian dengan PNG

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung mengatakan, pemerintah perlu meratifikasi RUU tentang Persetujuan di bidang Pertahanan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini (Papua New Guinea).

**M**enurutnya, dengan perjanjian tersebut Indonesia dapat mengelaminasi gerakan OPM (Operasi Papua Merdeka) yang mengatasnamakan *Melanesian Brotherhood*. Mengingat, hanya PNG dan Fiji negara di Kepulauan Pasifik yang mengakui kedaulatan Indonesia dan tidak mendukung OPM.

“Dari sekian banyak negara di Asia Pasifik, PNG dan Fiji adalah negara yang patut kita berterima kasih. Perjanjian ini kepentingan kita, bagaimana supaya

isu Melanesia tidak berkembang karena ini menyangkut kedaulatan kita, tanah air kita,” tegas Asril dalam RDP Komisi I dengan pakar Teuku Rezasyah dan Rodon Pedrason di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017) sore.

Lebih lanjut, politisi Gerindra ini juga mengatakan perlunya di galang opini internasional terkait isu Melanesia untuk meredam langkah Kepala OPM Internasional atau *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)* Benny Wenda yang diketahui mencari



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung

dukungan dari negara lain dengan menghembuskan isu ras Melanesia. Asril menegaskan bangsa Melanesia tidak hanya ada di daratan papua, sebaliknya justru banyak tersebar di wilayah timur Indonesia.

“Untuk itu, perlu digalang juga opini ini supaya tidak berkembang karena kedaulatan kita bisa terancam. Mudah-mudahan dalam waktu dekat perjanjian ini segera diratifikasi karena ini sangat penting. Kita tinggal menunggu Kepres,” tandasnya.

Sementara itu, pakar sekaligus akademisi Teuku Rezasyah mengatakan ratifikasi perjanjian Indonesia - PNG yang sudah ditandatangani Menteri Pertahanan pada 2010 sangat penting bagi Indonesia. Ia berpandangan, jika hubungan Indonesia - PNG semakin dekat, maka PNG bisa menjadi *bufferzone* Indonesia atau penahanan dari isu Melanesia yang tengah menggeroti negeri kita.

Lebih lanjut ia menjelaskan, selain untuk menggagalkan upaya diplomasi ULMWP, perjanjian ini juga untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan Indonesia - Papua New Guinea sepanjang 750 km. Sebagai bagian dari Nawacita, wilayah perbatasan hendaknya menjadi beranda Indonesia.

“Selama ini kan, mereka (PNG) komplain kerjasamanya kok sepihak, untungya cuma Indonesia, tetapi mereka banyak keluar energi. Untuk itu, kita harus membangun kerjasama yang ideal, karena kalau mereka iseng, bisa saja mengendorkan suatu titik tertentu. Saya juga sangat berharap, Indonesia - PNG membuka ruang kerja sama ruang angkasa untuk di wilayah perbatasan, misalnya dengan peluncuran satelit,” papar Teuku. ■

(ann/sc), Foto: Azka/hr

## Komisi VIII Janji Perjuangkan Penambahan Kuota Haji di Aceh

Pemerintah Provinsi Aceh minta Tim Kunjungan Panja Haji dan Umroh Khusus Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Aceh untuk menambah kuota Haji dan Umroh di Aceh. Sebagaimana diketahui mayoritas penduduk di Aceh beragama Islam, oleh karena itu Aceh minta kuota Haji dan Umroh dibedakan dari provinsi lain,

**M**enanggapi usulan tersebut, Ketua Panitia Kerja Haji dan Umroh Khusus Komisi VIII Noor Achmad berjanji akan memperjuangkannya.

“Saya menerima baik, dan saya akan bicarakan ini kepada anggota Komisi VIII lainnya. Aceh yang di kenal sebagai kota Serambi Mekah sudah seharusnya kita perjuangkan,” katanya usai pertemuan tim dengan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, pemilik travel haji dan umroh di Aceh dan jajaran Kepolisian Daerah Aceh, di Banda Aceh, Jumat (22/9).

Noor Achmad yang juga Wakil Ketua Komisi VIII ini menjelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Aceh selain mengusulkan penambahan kuota haji, juga mengusulkan standarisasi biaya minimal dan biaya maksimal.

“Menegenai stadarisasi biaya minimal dan biaya maksimal ini cukup baik dan saya apresiasi. Dengan adanya tolak

ukur bisa terlihat apakah nantinya ada penipuan atau tidak,” jelasnya.

Dengan adanya standar biaya ini, lanjut politisi Golkar tersebut, maka jika harga terukur misalnya ditentukan Rp 15 juta, berarti tidak ada yang boleh memberikan biaya di atas atau di bawah harga tersebut. Dan jika masih ada itu berarti terjadi penipuan.

Oleh karena itu, tegas anggota dewan dapil Jawa Tengah ini, untuk memperbaiki sistem kerja penyelenggaraan Haji dan Umroh, Komisi VIII akan menyempurnakan Undang-Undang Haji dan Umroh, terutama yang terkait Haji dan Umroh khusus.

“Karena kita tahu ada banyak travel tidak hanya satu atau dua yang ternyata banyak melakukan penipuan. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan yang lebih intens dari Kemenag dan juga Kementerian Pariwisata terhadap travel-travel yang menjalankan haji khusus dan umroh,’ tutupnya. ■

(mi/sc), Foto: Rumi/hr



Wakil Ketua Komisi VIII, Noor Achmad

# Pembangunan Tol Binjai - Tebing Tinggi Terkendala Pembebasan Lahan



Tim Kunspek Komisi XI DPR meninjau pembangunan Tol Binjai di Prov.Sumut



Tim Kunjungan Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan ruas Tol Binjai - Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi, mendapatkan informasi bahwa penyelesaian pembangunan ruas jalan tol tersebut terkendala pembebasan lahan.

**W**akil Ketua Komisi XI yang memimpin tim ini Hafisz Tohir, mengatakan hambatan penyelesaian pembangunan jalan ruas Tol Medan Binjai adalah pembebasan lahan yang peruntukkan lahannya tumpang tindih, yaitu lahan yang dimiliki dua nama atau lahan yang tidak ada namanya tetapi dikuasai oleh rakyat.

“Ini (kendala pembebasan lahan) yang membuat upaya menyambung pembangunan ruas tol Medan - Binjai menjadi terhambat, sehingga *time frame* yang kita putuskan menjadi terlambat dan mundur, di lain pihak harga tanah semakin melonjak,” katanya di sela-sela peninjauan ruas tol Binjai - Tebing Tinggi di Sumatera Utara, yang menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN), beberapa hari lalu.

Menurutnya, pembebasan lahan merupakan akumulasi yang paling besar dari sistem infrastruktur, sehingga penanganan pembahasan lahan harus dilakukan dengan cepat sesuai dengan yang telah direncanakan.

“Sebenarnya hambatan seperti ini tidak perlu terjadi, semestinya sudah dipelajari sejak awal, karena sering terjadi hal seperti ini, yang mengakibatkan jumlah Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengeluarkan talangan dana meningkat dari rencana awal,” ungkapnya.

Diketahui, negara memberikan PMN pembangunan infrastruktur yang cukup besar yaitu Rp 65 triliun. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu mendapatkan perhatian dan diawasi oleh DPR sebagai pertanggungjawaban wakil rakyat, dalam mengawasi uang rakyat tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah.

“Dan kunjungan ini, untuk melihat mereka bertanggungjawab terhadap beban APBN yang sudah diberikan kepada mereka. Dalam pengawasan ini akan dicocokkan antara proposal yang diajukan dengan yang telah dilaksanakan,” tandasnya. ■



Tim Kunspek Komisi XI DPR didampingi Bupati Minsel meninjau penyulingan air bersih di Minahasa Selatan, Sulut

## Minsel Pantas Dijadikan Pilot Project Bagi Daerah Lain

Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara (Sulut) pantas dijadikan Pilot Project bagi daerah-daerah lain dalam hal berbagai program peningkatan pembangunan yang ada.

**H**al ini diungkapkan Ketua Komisi XI DPR, Melchias Markus Mekeng kepada pers usai pertemuan antara Tim Kunspek Komisi XI DPR dengan Bupati Minsel, Sulut, Christiany Eugenia Paruntu beserta jajarannya, di Kantor Bupati Minsel, Sulut, Selasa (19/09'2017).

“Dari hasil laporan Bupati Minsel dan melihat langsung, dapat kami simpulkan program pembangunan di Minsel khususnya infrastruktur sangat baik. Terbukti, bantuan pemerintah pusat bisa dibangun dengan baik tanpa ada masalah,” ujar Mekeng - panggilan akrab politisi Golkar ini.

Mekeng mengatakan, Komisi XI DPR menampung kebutuhan anggaran yang sudah disampaikan Bupati Minsel. Begitu juga dengan masalah anggaran, pihaknya akan mengusulkan ke Kementerian Keuangan agar dapat menganggarkan berbagai program pembangunan di Minsel.

Menurutnya, Minsel layak didukung karena memiliki potensi yang cukup besar baik pariwisata, agrowisata, pertambangan, pertanian maupun perikanan, makanya perlu dukungan bantuan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik dan air bersih sesuai nawacita Presiden RI Jokowi.

Komisi XI DPR menyarankan kepada Bupati Minsel agar dapat menggunakan pihak ketiga yang dibentuk pemerintah pusat, yaitu PT. SNI (Sarana Multi Infrastruktur) dalam hal mempercepat pembangunan melalui pinjaman.

Dirut PT. SNI, Erna dalam pertemuan mengatakan persetujuannya karena melihat adanya potensi di Minsel. “Oleh karena itu, Komisi XI DPR berharap PT. SNI dapat membantu membangun infrastruktur yang ada di Minsel agar ke depan bisa terus digenjut menjadi kawasan yang maju dan berkembang.

Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Komisi XI DPR atas kunjungannya. “Saya berharap Komisi XI DPR dapat membantu dengan menganggarkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan RI untuk mengalokasikan anggaran yang sangat kami butuhkan,” harapnya.

Untuk saat ini, lanjut dia, ada sejumlah program pembangunan yang dituntaskan di Minsel dengan berharap adanya topangan dana dari pemerintah pusat. ■

(w/np), Foto: iwanfhr



# Komisi IV DPR Tinjau Industri Perikanan Kota Bitung

Komisi IV DPR dalam kunjungan spesifik di kota Bitung, Sulut meninjau dan memantapkan permasalahan yang memang belum menyatu tentang perikanan antara nelayan dan perusahaan yang membutuhkan ketersediaan ikan di perusahaan pengelolaan.

**B**isa dilihat salah satu investasi penanaman modal asing (PMA) yang terbengkalai bisa dioptimalkan untuk menyerap lapangan kerja sebanyak 1.700 orang. “Saya pikir ini modal yang murah buat negara kita dalam waktu sekejap hanya dengan kebijakan saja bisa lahir lapangan pekerjaan baru,” ungkap Ketua

Komisi IV DPR Edhy Prabowo usai dialog dengan Walikota Bitung, Dirjen Perikanan Tangkap dan stakeholder industri pengolahan perikanan di Kantor Walikota Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (26/09/2017).

Lebih lanjut Ketua Tim Kunspek Komisi IV ini mengatakan, dalam rapat selanjutnya tanggal 4 Oktober

mendatang, akan diadakan pertemuan khusus dan secara teknis menghadirkan Walikota Bitung Max Lomban. Dia diminta menjadi moderator antara Pemerintah dan pelaku usaha perikanan.

“Harapan kami di DPR pertengahan Oktober mudah mudahan sudah tidak ada lagi masalah kekurangan ikan dan masalah pengangguran akibat kebijakan yang belum matang”. katanya.

Politisi dari Partai Gerindra ini menambahkan, permasalahan perikanan di kota Bitung harus diselesaikan bersama, dan kebijakan yang belum selesai bisa selesaikan pada bulan Oktober mendatang karena menyangkut proses penganggaran yang harus diselesaikan pada bulan itu juga. ■

(ref.mp), Foto: Arief/hr



Tim Kunspek Komisi IV DPR meninjau industri Perikanan di Kota Bitung

# Formappi Usul Buat Kajian Urgensi Pembangunan Gedung DPR



Koordinator Formappi, Sebastian Salang (tengah)

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengusulkan, untuk menghentikan kesimpangsiuran informasi yang diterima masyarakat terkait pembangunan gedung baru DPR RI maka perlu dibuat kajian mengenai urgensi pembangunan gedung baru tersebut.

“Kajian yang jelas perlu disiapkan, agar masyarakat mengetahui bahwasanya DPR memang perlu pembangunan gedung, misalnya karena over kapasitas tadi. Kita kan juga tidak mau kalau lift di Gedung Nusantara I itu jatuh,

kita tidak mau anggota DPR celaka,” katanya pada seminar nasional “Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen; Pembangunan Alun-Alun Demokrasi dan Gedung DPR RI” di Ruang Abdul Muis Gedung Nusantara DPR RI Senayan,

Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Menurutnya, kajian sangat diperlukan untuk meyakinkan publik bahwa pembangunan gedung memang suatu kebutuhan anggota yang urgen. Kajian itu juga bisa dijadikan sumber informasi semua anggota DPR jika ada masyarakat atau awak media yang menanyakan sehingga masyarakat menerima informasi yang benar.

“Perlu kajian yang jelas sehingga jika anggota berbicara tentang pentingnya gedung baru ada rujukannya. Dan hasil kajian tadi bukan imajinasi atau keinginan anggota yang macam-macam tetapi memang keperluan yang urgen. Perlu manajemen komunikasi agar informasi tidak simpang siur, kita mau yang disampaikan itu kebutuhan bukan keinginan,” ungkapnya.

Dalam hal ini lanjut Salang, yang harus membuat kajian adalah Sekjen selaku pemerintah yang harus memenuhi sarana prasarana anggota DPR. Selain itu juga untuk penunjang kinerja DPR agar nyaman dalam bekerja. ■

(sc), Foto: Jayed/hr

## Negara Harus Penuhi Hak Asasi Air

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena mengatakan paradigma utama Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (SDA), yaitu untuk pemenuhan Hak Asasi Air kepada seluruh masyarakat, sehingga air yang merupakan hak dasar manusia harus dikelola dan diawasi oleh negara.

“Kami mengapresiasi atas pikiran cerdas dan revolusioner yang disampaikan para pakar yang sudah sangat teruji integritas dan kapasitasnya sehingga apa yang dikontribusikan di sini sebagai masukan sangat membantu kami dalam pembahasan RUU SDA,” ungkapnya usai memimpin RDPU di ruang rapat komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Atas masukan yang sangat komprehensif, Michael berharap tidak terjadi lagi judicial review di kemudian hari. Sebab, pihaknya juga telah melakuakn Focus Group Discussion (FDG) di beberapa provinsi, masukkan dari praktisi, akademisi dan stakeholder lainnya yang mempunyai

kepedulian terhadap air.

“Air adalah Hak Asasi daripada manusia, karena sifatnya asasi maka pemerintah harus terlibat dan bertanggung jawab. Apapun kajian dan tinjauan yang kami lakukan semua ini untuk kemaslahtan masyarakat,” tandasnya.

Di tempat yang sama, salah satu pakar yang hadir, A. Irmanputra Sidin mengatakan tujuan RUU SDA yaitu menjaga agar akses ke sumber air untuk kebutuhan masyarakat umum tidak terhalang.

“Pengelolaan air dalam paradigma konstitusional jangan lagi berpikir air dalam paradigma konstitusi, jangan lagi berpikir air itu sebagai semata memiliki nilai ekonomis, paradigma utama adalah air itu hak asasi setiap manusia, dimana

negara wajib melakukan pemenuhan, perlindungan, penegakan inilah yang harus dijamin dalam RUU SDA,” tegasnya.

Jangan lagi, lanjut Irmanputra membuat UU dengan paradigma mengatur proses air karena memiliki nilai ekonomis, hal itu sudah ditinggalkan. Ia mengajak agar RUU SDA nantinya mengatur pemenuhan, bisa mengakses air minum yang bersih.

“Jangan sampai air yang terhidang di rumah itu air dalam konsep ekonomis. Pada dasarnya melakukan perlindungan ari memang tidak bisa lepas dari aspek-aspek pengelolaan dan perusahaan air. Oleh karenanya perusahaan air ini harus dikelola negara, negara harus berada di depan,” tuturnya. ■

(rmm), Foto: Kresno/hr



# RUU SDA Harus Fokus Pada Pengelolaan Sumber Daya Air

Rancangan Undang-Undang (RUU) Sumber Daya Air yang tengah dibahas Komisi V DPR RI diharapkan fokus pada manajemen dan pengelolaan sumber daya air. Tata kelola air harus berasaskan kebersamaan dan pemerataan secara berkelanjutan.

**D**emikian mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V dengan sejumlah stakeholders, diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Geologi dan Pakar Lingkungan Hidup Emil Salim tentang RUU Sumber Daya Air di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/09/2017).

"Ini masukan yang luar biasa, yang selama ini belum pernah terpikirkan. Apa yang menyangkut masalah pengelolaan dan manajemen air di Indonesia patut menjadi perhatian. Karena, beberapa kementerian selama ini bekerja sendiri-sendiri sesuai bidangnya tanpa memperhatikan pengelolaan air yang berkelanjutan," ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin Mohamad Said.

Ia mengatakan, segala bentuk masukan yang dihimpun Komisi V melalui RDP dan RDPU akan menjadi referensi dalam penyusunan RUU SDA, khususnya usulan untuk pengelolaan sumber daya air. Sama halnya dengan bumi dan kekayaan alam lainnya, air harus betul dikuasai negara untuk sebesar-sebesarnya kesejahteraan rakyat.

"Masukan hari ini bisa menjadi bahan kami dalam rangka penyusunan RUU ini secara sempurna. Sehingga bisa memenuhi harapan kita, bukan harapan pada hari ini saja tetapi masa-masa akan datang," sambung politisi Golkar ini.

Sebelumnya, Emil Salim mengungkapkan manajemen dan pengelolaan air yang buruk menyebabkan air yang layak konsumsi menjadi langka.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M Said

Bahkan, ia memprediksi 20 – 30 tahun mendatang kelangkaan air tawar bisa saja terjadi.

"Faktanya di bulan september ini kita mengalami kekeringan. Kekeringan air tidak lagi menjadi teori. Kekurangan air terasa hampir diseluruh daerah. Jadi, prakarsa dari DPR untuk mengangkat air menjadi suatu UU pantas dihargai, sebagai hal yang mengaku adanya prioritas dalam hal pengelolaan air," ucapnya.

Selain itu, Emil menuturkan harus ada sebuah keseimbangan dalam penggunaan air karena jika tidak maka dampak perubahan iklim akan semakin dirasakan. Ia mengusulkan agar mata air/ SDA dikuasai oleh negara, bukan perorangan, kelompok masyarakat ataupun badan usaha.

Emil juga mengusulkan dibentuknya suatu Badan Otorita Sumber Daya Air sebagai koordinator. Mengingat, saat ini air diatur oleh tiap-tiap kementerian terkait. "Yang belum adalah menjamin koordinasi efektivitas sampai ke lapangan, untuk itu ingin diusulkan RUU ini adanya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, sehingga air terpenuhi walaupun di musim kemarau," tandas Menteri Lingkungan Hidup era Soeharto ini. ■



Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena bersama sejumlah Anggota DPR dan pakar berfoto bersama, usai melakukan rapat

# BNPP Harus Dikeluarkan Dari Kemendagri

Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik menilai Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) harus dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri, bahkan harus terus diperkuat kelembagaannya. Hal tersebut diungkapkannya dalam Seminar Nasional 'Pembangunan Daerah Perbatasan sebagai Beranda Depan NKRI' di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

“Selama ini Mendagri menjadi Exoficio dari Kepala BNPP, di sini saya lihat beban Kemendagri sudah terlalu banyak, mulai dari urusan pemerintahan sampai perbatasan dikerjakan Mendagri, jadi Mendagri terlihat kurang fokus. Sehingga hal ini membuat posisi BNPP di bawah Kemendagri menjadi kurang lincah,” ujar Erma.

Ditambahkan anggota Dapil Kalimantan Barat ini, seharusnya BNPP diawasi oleh kementerian yang tidak terlalu banyak tugasnya. Sehingga pengembangan wilayah perbatasan dapat berjalan lebih maksimal. Selama ini BNPP hanya menjalankan fungsi koordinasi tanpa eksekusi.

Sebelumnya, lanjut Erma, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sebagai Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan, sempat mengusulkan agar BNPP dijadikan kementerian tersendiri. Namun ia tak menyetujui hal tersebut. Pasalnya, hal itu akan semakin menambah berat beban keuangan negara. Ia berpendapat BNPP agar dialihkan ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Kalau di bawah Kemendes kita tidak perlu tambah anggaran, bisa dialokasikan anggaran ke pembangunan wilayah perbatasan bukan untuk birokrasi,” kata Erma.

Pada kesempatan itu Erma juga menilai



Anggota Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik

perlu undang-undang khusus tentang pengelolaan wilayah perbatasan untuk mengembangkan wilayah perbatasan. Bukan semata permasalahan infrastruktur, melainkan hal yang lebih fundamental lagi, salah satunya permasalahan keamanan warga perbatasan. ■

(ayu), Foto: Kresno/hr

## Nikah Siri Suburkan Pernikahan Usia Dini

Terungkapnya jaringan penyedia jasa nikah siri ternyata ikut andil menyuburkan pernikahan usia dini. Yang selalu menjadi korbannya adalah perempuan. Edukasi bagi kaum perempuan menjadi urgen dilakukan.

“Kasus lelang keprawatan dan jasa nikah siri yang saat ini ditangani Polda Metro Jaya merupakan tindakan yang jauh dari peradaban kemanusiaan. Dalam kasus tersebut, perempuan menjadi obyek penderita, perempuan merupan korban, dan perempuan menjadi komoditas.” Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati dalam rilisnya, Rabu (27/9/2017).

Tawaran jasa nikah siri sebenarnya banyak ditemukan di tengah masyarakat. Dan kini, merambah ke media sosial. Polda

Metro yang kini sedang menangani kasus ini, harus serius menindak para pelaku penyedia praktik nikah siri. Hukum harus ditegakkan kepada siapa pun yang melakukan tindak pidana.

“Praktik nikah siri ini jika dibedah, lebih banyak merugikan kelompok perempuan. Semuanya bermula dari tidak dipegangnya pengadministrasian calon mempelai sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” kata Sekretaris Dewan Pakar PPP ini. Dampaknya dari nikah siri tidak sederhana, seperti suburnya pernikahan dini di kalangan perempuan dan anak-anak.

“Perempuan yang hamil di usia dini

akan mengancam jiwa ibu dan tumbuh kembang anak. Belum lagi persoalan gizi anak yang akan terganggu,” ungkap Okky. Untuk mengatasi persoalan tersebut, kuncinya terletak pada edukasi kepada masyarakat khususnya kaum perempuan.

Peran pemerintah, agamawan, tokoh masyarakat, orang tua, serta kalangan perempuan sendiri harus mengemuka dan menyerukan dampak negatif yang muncul dari nikah siri ini. Upaya harus dilakukan, agar posisi perempuan tidak lagi sebagai obyek penderita. ■

(mh,mp), Foto: Rani/hr



# Hidroponik Solusi Menanam di Tengah Ibukota

Anggota komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati Soemarijanto (F-PDI Perjuangan) mengungkapkan, dengan adanya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) membuatnya terinspirasi untuk membangkitkan kembali pemahaman, keinginan dan pengetahuan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Ibukota terhadap budaya menanam pohon. Dengan keterbatasan ruang hijau yang saat ini dimiliki oleh masyarakat ibukota mengharuskan mereka (Masyarakat Jakarta-red) mengenyampingkan keinginan untuk bercocok tanam, walau hanya untuk sekedar hobi bahkan untuk kebutuhan industri.

**H**al itu diungkapkannya saat mengadakan Sosialisasi Hidroponik Menuju Urban Farming di RPTRA Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/17). Kegiatan ini bekerjasama dengan Kelurahan Gondangdia, dan para aktivis di bidang lingkungan hidup yang ditujukan kepada masyarakat sekitar juga para PKK dan pengelola RPTRA Gondangdia.

Menurut Itet, dengan adanya metode hidroponik, masyarakat yang mempunyai hobi bertanam dapat sangat terbantu, mengingat bertanam dengan hidroponik tidak dibutuhkan tanah atau lahan yang luas, hanya dengan media air.

“Hidroponik itu dengan air kita tidak perlu mencari tanah atau tempat

yang luas, sehingga kita masih tetap mempunyai ruang hijau di setiap rumah, karena kan rumah-rumah di kota ini kan sudah sempit sekali, dan ini juga untuk melawan globalisasi panas perubahan iklim, karena perubahan iklim maka akan terjadi panas yang luar biasa, kalau kita tidak hijaukan itu akan lebih panas lagi, maka mari kita mengajak masyarakat kota untuk tetap bisa bercocok tanam dengan lahan yang sempit ini,” terang politisi daerah pemilihan Lampung II.

Selain itu, menurutnya, hal ini sudah pernah ia lakukan dan praktekan ke konstituennya yang berada di Lampung. Di desa, para petani yang memiliki pendidikan rendah saja bisa menerima sistem penanaman Hidroponik ini, maka tidak menuntun kemungkinan masyarakat kota yang jauh lebih tinggi pendidikan dan tingkat stratanya dapat dengan mudah mengaplikasikannya di rumah-rumah mereka.

“Desa itu audience nya petani yang pendidikannya juga rendah tapi bisa nyambung karena mereka tahu bahwa itu penting. Cuma mereka di sana tidak mendapatkan teknologi yang profesional seperti yang di kota, tapi karena keinginan mereka tetap supaya hasil pertanian mereka kualitasnya naik



Anggota Komisi VIII DPR RI, Itet Tridjajati Soemarijanto

maka mereka sangat antusias itu yang saya sangat gembira,” jelas Itet.

Dirinya juga bersyukur, acara sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat, diantaranya, dokter, guru, aktivis, ibu rumah tangga hingga profesional. Dari kegiatan yang terjalin, para peserta sosialisasi dapat dengan mudah memahami dan mengikuti juga mengaplikasikannya di tempat terkait praktek Hidroponik.

Itet juga berharap, kegiatan ini akan dapat terus dilangsungkan, agar pemahaman terkait mencintai lingkungan dan alam dapat tersebar luas, terlebih dengan adanya pemanasan global (Global Warming) dan perubahan cuaca yang cukup ekstrem sehingga membuat panas di Jakarta semakin menjadi. Dengan adanya hidroponik ini dapat membantu menambah atau membuka kembali ruang terbuka hijau di Jakarta. Selain itu juga, kemudahan mendapatkan sayuran yang bersih dan higienic juga dapat terealisasikan. ■



Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati



<https://learn.woahstork.com>

(ndy), Foto: Jakarta/hr

## BKD Beri Bimbingan Teknis Legal Drafting di UIN Jakarta



Kepala Badan Keahlian DPR RI, Johnson Rajagukguk sedang menjelaskan teknis Perancang Perundang-undangan (legal drafting) di hadapan ratusan Mahasiswa UIN

Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menjadi narasumber dalam pembekalan teknis Perancang Perundang-undangan (legal drafting) di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Jakarta. Beberapa hal dibahas mulai dari tahap penyusunan undang-undang hingga pengesahan.

**S**ebagai sistem pendukung, Johnson memaparkan peran dan fungsi BKD sebagai sarana penunjang kerja dewan dari segi keahlian. “BKD adalah sistem pendukung DPR yang bertugas dalam fungsi keahlian,” ujar Johnson, Selasa (26/9/2017).

Dalam pembahasan UU, lanjut Johnson dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah yang diwakili menteri yang membidangi. Hal ini dapat dimulai

dengan menyusun naskah akademik sebagai tahapan penyusunan.

“RUU dapat berasal dari DPR dan presiden yang harus didahului oleh naskah akademik,” terang Johnson.

Dalam proses pembahasan UU, dapat dilakukan melalui pembahasan tingkat I di komisi untuk selanjutnya dilanjutkan pembahasan di tingkat II. Hal itu dilakukan secara berkesinambungan, artinya tidak ada pembahasan tingkat II tanpa didahului

adanya pembahasan di tingkat I.

“Pembahasan RUU dilakukan melalui dua tahapan yakni pembicaraan tingkat I di komisi, baleb, banggar atau pansus lalu dilanjutkan pembahasan di tingkat II di paripurna,” jelas Johnson.

Setelah mendapatkan persetujuan di paripurna, UU kemudian dikembalikan ke Presiden untuk dapat dilakukan penandatanganan, meskipun tanpa ada tanda tangan presiden hingga 30 hari, sebuah UU akan tetap berlaku.

“Penyampaiannya RUU dari DPR ke Presiden dapat dilakukan paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Sedangkan RUU disahkan presiden dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 hari sejak disetujui bersama, meski dalam waktu 30 hari RUU



## RUU BUMN Akan Atur Direksi dan Komisaris BUMN

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan bisa lebih fleksibel memberikan penguatan kepada direksi atau komisaris dalam menjalankan usaha milik negara. Pengelolaan BUMN yang baik bisa mengangkat harkat dan martabat rakyat.

Demikian disampaikan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Pelindo, Jasa Marga dan Angkasa Pura terkait harmonisasi RUU BUMN di Gedung DPR RI, Jakarta, baru-baru ini.

“Kita berharap dengan harmonisasi ini, RUU tentang BUMN bisa lebih fleksibel memberi penguatan kepada direksi untuk melakukan aksi korporasi yang menguntungkan bagi perusahaan, terutama memberikan kontribusi bagi APBN kita,” papar Supratman.

Diakui, Supratman ruang gerak BUMN terbatas karena highly regulated atau sangat dipengaruhi dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, setidaknya ada 10 peraturan perundang-undangan yang mengatur gerak BUMN. Beda halnya dengan swasta yang hanya memperhatikan 2 UU, yaitu UU Pajak dan UU Perseroan Terbatas. “Karena itu, ini yang ingin kita coba sempurnakan di dalam RUU tentang BUMN,” sambungnya.

Menurutnya, beberapa hal yang akan diberikan penguatan dalam RUU tentang BUMN, diantaranya akan mengatur ketentuan pemilihan direktur dan komisaris. Hal ini diperlukan untuk memastikan keberadaan direktur dan komisaris BUMN merupakan orang yang tepat dan menghindari rangkap jabatan.

“Kita akan memformulasi sejauh mana urgensinya, apakah memang bisa diberlakukan terhadap semua BUMN, atau hanya BUMN strategis yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam,” jelas politisi Gerindra ini.

“Demikian pula halnya soal Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pengawasan terhadap BUMN, bagaimana mekanisme kontrol dilakukan secara internal maupun eksternal, jangan sampai semakin banyak lembaga pengawasan yang membuat

mereka ragu melakukan tindakan aksi korporasi yang akhirnya membuat korporasi tidak bisa berkembang,” tutup Supratman.

Sebelumnya dalam RDP tersebut, PT Angkasa Pura II (Persero) berharap revisi UU BUMN memberikan perubahan konstelasi bisnis pada BUMN, sehingga tidak lagi bersifat birokratif namun lebih korporatif. Juga, memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan guna meningkatkan daya saing global. ■



Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas

belum ditandatangani presiden, sebuah RUU akan tetap sah menjadi UU,” terang Johnson.

Selama pembahasan hingga pengesahan, BKD memiliki peran dalam mengawal pembahasan serta memberikan dukungan keahlian berdasarkan sudut pandang akademis, meskipun tidak bisa diabaikan bahwa dalam pengesahan UU juga tidak lepas dari pertimbangan politis.

Johnson berharap dengan adanya pembekalan teknis ini akan mampu memberikan pemahaman utuh kepada mahasiswa UIN Jakarta terkait proses penyusunan UU. “Mudah-mudahan dengan adanya bimbingan teknis ini dapat memberikan pemahaman tentang penyusunan UU kepada mahasiswa,” pungkas Johnson. ■

(ns), Foto: Jaka/hr

(anm.sc), Foto: Rumi/hr

# Beberapa BUMN Penerima PMN Merugi

Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada beberapa BUMN diharapkan memberikan keuntungan, namun ironisnya, malah mengalami kerugian



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Soepriyatno dan Direktur LMAN, Rahayu Puspasari

“Ada perusahaan yang ruginya makin besar. Jadi kita minta kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan audit kepada perusahaan BUMN yang menerima PMN,

tapi malah merugi,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno, saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, baru-baru ini.

Padahal, tambah Soepriyatno, ada beberapa perusahaan BUMN di bawah Kemenkeu menunjukkan kinerja yang baik. Hal itu terlihat dari meningkatnya sisi aset, keuntungan, hingga dividen. Pihaknya meminta kepada perusahaan di bawah Kemenkeu untuk meningkatkan kinerjanya.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, Permodalan Nasional Madani (PNM) salah satu BUMN yang mendapat kucuran PMN. Namun, dilaporkan PNM malah merugi. “Ini BUMN terima PMN dengan bunga yang rendah dan mudah, kemudian merugi. Jadi kenapa meruginya ini? Kita meminta dilakukan audit

investigasi kepada BUMN kita,” tandas politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Sementara itu Anggota Komisi XI DPR RI M. Misbakhun mengakui bahwa sebagian kecil dari banyak BUMN yang mengalami kerugian setelah menerima PMN. Namun ia meminta, perusahaan BUMN yang bergerak di sektor keuangan agar memberikan dukungan kepada pembangunan infrastruktur dalam rangka memperkuat rasio dalam rangka struktur pembiayaan.

Direktur LMAN Rahayu Puspasari mengatakan LMAN hanya mendanai lahan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Pada APBN-P 2016, dialokasikan anggaran sebesar Rp 16 triliun, untuk 27 ruas jalan tol. Sementara pada APBN-P 2017, dialokasikan anggaran sebesar Rp 32,05 triliun, untuk 78 proyek. ■

(hr.sf), Foto: Eka/hr

## PT Pos Berperan Informasikan Kegiatan DPR di Sumbawa

Distribusi Majalah dan Bulletin Parlementaria di Kabupaten Sumbawa tidak bisa lepas dari peran aktif Petugas PT Pos Indonesia Kabupaten Sumbawa.

“Pengiriman Bulletin dan Majalah dilakukan PT Pos Indonesia. Mulai pukul 01.00 Wita Pak Pos mengambil paket Bulletin dan Majalah di Bandar Udara Lombok dan segera di distribusikan maksimal pukul 09.00 wita,” jelas Rustam, Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Kantor Pos Sumbawa Besar saat menerima kunjungan Djaka Dwi Winarko, Kepala Kepala Biro Pemberitaan Parlemen DPR, di Sumbawa, Rabu. (27/09/2017).

Djaka mengapresiasi peran Pak Pos yang mendistribusikan Bulletin dan Majalah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, DPRD, Dinas Perpustakaan dan Dokumentasi, dan Kantor Kepolisian Resort Sumbawa.

“Tanpa peran Pak Pos informasi tercetak tentang DPR tidak akan sampai ke pelosok Indonesia. Kami berharap informasi

tentang DPR dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia baik di pusat dan daerah termasuk masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Terima kasih Pak Pos,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, media cetak bulletin Parlementaria dengan oplag 12.500 exemplar didistribusikan ke 100 titik kedutaan RI di luar negeri dan ke 3.900 titik di seluruh Indonesia. Salah satunya ke Kabupaten Sumbawa. ■



Kabiro Pemberitaan Djaka Dwi Winarko berdialog dengan Pjs Kepala Kantor Pos Sumbawa

(dz.mip), foto : jazulif/hr

# Masyarakat Terima Informasi Tak Utuh tentang Penataan Kawasan Parlemen



Ketua BURT DPR, Anthon Sihombing memberikan sambutan dalam Seminar Nasional Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anthon Sihombing mengatakan, pelaksanaan Seminar Nasional Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen “Pembangunan Alun-alun Demokrasi dan Gedung DPR” kali ini dilatarbelakangi munculnya pro-kontra rencana pembangunan gedung DPR. Wacana itu muncul dan bergulir sejak DPR periode 2004-2009 yang merupakan salah satu *grand design* penataan kawasan parlemen yang telah direkomendasikan oleh Tim Peningkatan Kinerja Parlemen.

**M**enyampaikan sambutan pada seminar yang digelar di Ruang Abdul Muis Gedung Nusantara, Senayan, Rabu (20/9), lebih lanjut Anthon mengatakan, gagasan itu ditindaklanjuti oleh DPR 2009-2014 yang terhenti di tahun 2011 hingga DPR periode sekarang melalui Pembentukan Tim Implementasi Reformasi DPR-RI 2014-2019. Tim ini menyampaikan rekomendasi Renstra DPR tahun 2015-2019 sehingga menjadi agenda prioritas DPR sekarang ini.

Menurut politisi Golkar ini, seminar kali ini mendiskusikan rekomendasi Tim Implementasi Reformasi DPR yaitu pembangunan alun-alun dan gedung DPR. “Kami memandang masyarakat memperoleh informasi yang kurang utuh tentang penataan kawasan parlemen.

Karena itu seminar ini diharapkan memberi penjelasan kepada pemangku kepentingan mengenai pentingnya alun-alun demokrasi dan Gedung DPR,” jelas Anthon.

Selain itu melalui acara ini dapat muncul persepsi obyektif dari masyarakat sehubungan rencana pembangunan alun-alun demokrasi dan gedung DPR sehingga dapat membangun memori politik bangsa mengenai pentingnya sarana demokrasi di Indonesia yang kita cintai ini.

Kepada nara sumber dia menyampaikan terima kasih yang telah memberikan sumbangsih pemikiran juga kepada Sekjen dan Kepala Badan Keahlian DPR atas terselenggaranya acara ini.

Hadir dalam seminar nasional

ini perwakilan dari Dirjen Anggaran Kemenku, Dirjen Cipta Karya KemenPU-PR, Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) serta mahasiswa yang tergabung beberapa BEM se Jabodetabek. Dalam acara ini diundang pula perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW) namun berhalangan hadir.

Sebagai moderator seminar ini mantan anggota DPR Dedy Gumelar yang akrab dipanggil Miing mempertanyakan, mengapa persepsi “public” asal dengar bangun gedung DPR soundnya negatif. “Apakah ketidakpercayaan kepada anggota DPR padahal yang membangun pemerintah dan anggota DPR cuma ngisi doang. Belum tentu yang ngisi gedung baru anggota DPR sekarang karena belum tentu terpilih lagi,” tukasnya. ■

(mp.ria), Foto: Jayadi/Inf



Wakil Ketua DPR Fadli Zon didampingi Sekjen DPR Achmad Djuned membuka acara pameran filateli dengan tema Prangko Dalam Kebhinnekaan di Gedung DPR, Selasa (26/9). Foto: Jayadi

Suasana RDP Komisi III DPR dengan KPK terkait sistem pengawasan terhadap pengelolaan dan manajemen aset hasil tindak pidana korupsi, Selasa (26/9). Foto: Andri



Badan Keahlian DPR menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Menakar Karier PNS Menurut PP No.11 Tahun 2017" di Ruang Rapat DPR, Rabu (27/9). Foto: Jaka